

**RETRIBUSI - USAHA**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 16 TAHUN 2001**  
**2001**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

- Abstrak** : - Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan, baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur mengenai retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang ditetapkan dengan perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam keputusan Bupati;  
- Dengan berlakunya perda ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Perda ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
- Diundangkan pada tanggal 22 Juni 2001
- Catatan** : -